

TESIS

**PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR.**

Disusun Oleh:

DIAN PERTIWI

1520112022

PROGRAM KOSENTRASI : HUKUM TATA NEGARA

Pembimbing I: Dr. Yuslim, SH., MH

Pembimbing II: Dr. Khairani, SH., MH



PROGRAM PASCASARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR.

*Dian Pertiwi, 1520112022, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 105
HALAMAN, Tahun 2017*

ABSTRAK

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama merupakan pengisian lowongan jabatan yang dimaksudkan untuk pembinaan karir PNS dalam jabatan struktural dimana pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama ini sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih ada penyimpangan terhadap aturan-aturan dan asas-asas yang ditetapkan. Panitia seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Tanah Datar memiliki kewenangan untuk memilih tiga nama disetiap lowongan jabatan yang dibuka. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam Tesis ini adalah Bagaimanakah mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Daerah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dan Bagaimanakah kewenangan Tim Panitia Seleksi dalam penetapan nama calon yang akan dipilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama secara terbuka pada Daerah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Berdasarkan apa yang diteliti maka mekanisme pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Kabupaten Tanah Datar terdapat beberapa asas-asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kurang dipatuhi dan dilanggar oleh penyelenggaraan pemerintah, sedangkan dalam Pasal 2 UU ASN menegaskan penyelenggaraan kebijakan Manajemen ASN harus berdasarkan asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisien, keterbukaan, nondiskriminasi, dan kesatuan keadilan dan kesetaraan. Kewenangan Tim Panitia Seleksi dalam penetapan nama calon yang akan dipilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada pengisian JPT Pratama secara terbuka pada Daerah Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sudah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 113 UU ASN. Seleksi dilaksanakan dengan terbuka tanpa ada intervensi dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Hal ini ditandai dengan tidak adanya peserta seleksi yang komplek terhadap hasil seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Pansel. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar harus merumuskan kembali kebijakan-kebijakan terkait untuk meminimalisir intervensi dan pengaruh luar yang menyebabkan pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama menjadi lebih objektif.

Kata Kunci: Pengisian, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kabupaten Tanah Datar

FULFILLMENT OF FIRST RANK LEADER POSITION IN TANAH DATAR DISTRICT

***Dian Pertiwi, 1520112022, Master of Law Science, University of Andalas, Year of
2017, Number of Pages 105***

ABSTRACT

Fulfillment of First Rank Leader position is filling a vacancy that intend to civil servant career development of structural rank in accordance with the requirements stipulated in the regulation. However, there are several irrelevance practice from the set rules and principles. The Selection Committee of First Rank Leader position in Government of Tanah Datar District has the authority to choose three names in every positions opened. Formulation of the problem are how the mechanism fulfillment of First Rank Leader position and how the authority of the Selection Committee on determination of candidate by Officials of Trustees Civil Servant Personnel on fulfillment of First Rank Leader position openly in Tanah Datar District. Research methodology used is legal juridical empirical research. The research shown that mechanism fulfillment of First Rank Leader position in Government of Tanah Datar District, several principles of Civil Service Apparatus (ASN) policy and management are less obeyed and violated by government officials, whereas in Article 2 of ASN Law confirms the implementation of management policies must be based on the principle of legal certainty, professionalism, proportionality, integration, delegation, neutrality, accountability, effectiveness and efficient, openness, non-discrimination, and the unity of justice and equality. The authority of the Selection Committe on determination candidate name that will be choose by Officials of Trustees Civil Servant Personnel on fulfillment of First Rank Leader position openly in Government of Tanah Datar District are in accordance with those mandated in Article number 113 of ASN Law. The selection managed openly without intervention by Officials of Trustees Civil Servant Personnel. It is characterized by the absence of participants complaining against the result of the selection performed by the Selection Committee. Government of Tanah Datar District must reformulate related policies to minimize external intervention and influence which leads to the implementation of fulfillment First Rank Leader position to be more objective.

Keywords: Fulfillment, High Leader Position, Tanah Datar District.